

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman :

02

Kompas	Kalteng Pos <input checked="" type="checkbox"/>	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Royalti Pertambangan Capai Rp604 Miliar

PALANGKA RAYA-Kalteng memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, termasuk sektor pertambangan. Karena besarnya potensinya, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran pun juga berfokus pada pengelolaannya yang maksimal. Berkat kepiawaiannya juga, royalti dari sektor pertambangan pun kian tahun makin meningkat. Pada Maret 2020 ini saja, royalti pertambangan di Kalteng mampu mencapai Rp604 miliar lebih dari target Rp967 miliar. Gubernur pun meminta pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng agar terus melakukan upaya pemantauan dan pengawasan melalui sistem *online*. "Sektor pertambangan ini harus terus

dipantau dan mengawasi royalti, kami optimistis dapat memenuhi target, meskipun situasi pandemi Covid-19 berdampak dalam berbagai aktivitas," kata Sugianto.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Kalteng Ermal Subhan mengatakan memang royalti pertambangan dari bulan ke bulan terus mengalami kenaikan. Menurutnya, royalti pertambangan pada 2015 mencapai Rp531 miliar dan tahun 2016 mencapai Rp951 miliar. Sejak kepemimpinan Sugianto Sabran, royalti pertambangan mengalami kenaikan sehingga pada 2017 lalu royalti pertambangan berada di angka Rp1,7 triliun. Pada 2018 lalu mencapai Rp2 triliun dan pada 2019 kembali naik menjadi Rp2,2 triliun.

"Kami terus berupaya dalam pengawasan royalti dan situasi pertambangan. Mudah-mudahan royalti dapat meningkat dari tahun ketahun dan melebihi target yang ditetapkan," kata Ermal, Senin (20/4).

Dengan demikian, jika dihitung secara akumulasi, sejak Sugianto menjabat sebagai Gubernur Kalteng ia mampu membukukan royalti pertambangan hingga menyentuh angka Rp6 triliun lebih. Selanjutnya penghasilan ini diserahkan ke Pemerintah Pusat serta dibagikan ke Kalteng dan kabupaten/kota sebagai dana tambahan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). (abw)